

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, namun semakin “meningkat tajam” bahkan menjadi idola dan harapan masyarakat¹. Kehadiran anggota Polri selalu dinantikan masyarakat dikala senang maupun susah, fakta dilapangan menunjukkan ketika masyarakat sedang mendapatkan kesenangan misal; sedang melaksanakan perayaan hari besar agama, peribadatan, hajatan pesta pernikahan, sunatan, melahirkan serta kegiatan lain yang bersifat gembira. Begitupun sebaliknya dikala menerima cobaan kesusahan, mengalami musibah, bencana alam, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, kematian, serta musibah lain keberadaan polisi selalu ada di dalamnya.

Kecintaan masyarakat terhadap Polri bisa dilihat juga dengan banyaknya animo pendaftar Polri dari tahun ke tahun semakin meningkat, masyarakat sadar bahwa masuk Polri tidak dipungut biaya. Hal ini agar keluaran polri semakin berkualitas, Polri telah menunjukkan perubahan signifikan yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

¹Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/11283051/kapolri-kepercayaan-publik-terhadap-polri-tertinggi-sejak-reformasi>.
Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Untuk mendapatkan sosok Polri yang profesional telah ditetapkan persyaratan masuk Polri² Kecintaan masyarakat terhadap Polri belum berhenti sampai disitu saja, hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas, per akhir Juni 2016, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 63,2%. Namun, angka ini naik menjadi 70,2% pada Oktober 2017. Selanjutnya survei Populi Center pada Agustus 2017 menunjukkan 67,6% responden puas dengan kinerja Polri. Sementara itu, survei yang digelar Alvara Research Center menempatkan Polri pada peringkat ketiga teratas lembaga yang memperoleh kepuasan publik tertinggi, yakni 78,8% pada Mei 2018, meningkat 1,6% dari Februari 2018 dengan menempati posisi ketiga terbaik. Selanjutnya survei LSI Juli 2018 indeks kepercayaan publik terhadap Polri 87,8% menempati posisi ketiga terbaik. Sedangkan survei Litbang Kompas Juni 2018 indeks kepercayaan publik terhadap polri mencapai 82,9%, merupakan indeks kepercayaan tertinggi sejak era reformasi. Survei the Gallup di tahun 2018 menempatkan Indonesia pada posisi ke-9 negara teraman dari 142 negara yang disurvei dan ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap polri terkait rasa aman dari gangguan kejahatan di Indonesia.³

Tidak hanya itu, pengakuan terhadap kepercayaan pada institusi Polri juga datang dari luar negeri dalam meningkatkan survei terkait Kepolisian, Tim Markplus Insight melakukan benchmarck terhadap survei sejenis di luar negeri, *Hongkong Police Service Satisfaction*

²Persyaratan Pendaftaran Bintara Polisi (Tugas Umum dan Polwan)

³Markplus insight. Marketing +Social Research, *Memotret Upaya Polri dalam membangun Public Trust: Survei Persepsi Masyarakat Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

Survey 84% responden memberikan penilaian “sangat puas” atau “cukup puas” dengan kinerja seluruh layanan Kepolisian Hongkong. Penilaian ini merupakan persentase tertinggi sejak awal PSS pada tahun 2000⁴. Sementara Kepolisian Inggris *British Crime Survey* memberikan penilaian “sangat puas” atau “cukup puas” dengan kinerja keseluruhan layanan dari Kepolisian di Inggris menunjukkan fluktuasi, hal ini berarti bahwa tidak mudah menjaga indeks kepercayaan masyarakat.

Upaya meningkatkan kinerja dapat dilihat sejak berpisahnya Polri dari tubuh ABRI mulai tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri sendiri, paling tidak Polri dapat “mandiri” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang semula masih terintegrasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diterapkan filosofi pendidikan “Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana”, yang artinya membentuk Prajurit Pejuang dan Pejuang Prajurit. Akan tetapi, filosofi tersebut sudah tidak cocok bila dijadikan filosofi pendidikan Polri saat ini, sehingga perlu adanya filosofi baru. Perubahan ini dibutuhkan karena keluaran pendidikan Polri diharapkan melahirkan Polri yang mampu menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional dan menjunjung tinggi HAM.

⁴ Police Service Satisfaction Survey and Public Opinion Survey, *Hongkong Police Force 2018 & Trust and Confidence in the Police: A Conceptual Review*

Filosofi pendidikan Polri yang baru⁵, yaitu: “Mahir, Terpuji, Patuh Hukum”. Adapun arti dari filosofi pendidikan Polri adalah:

1. Mahir artinya merupakan wujud tingkat keahlian tertentu pada setiap fungsi Kepolisian, dan mampu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, sehingga menjadi sosok Polri yang memiliki kepribadian unggul yang efektif dan mampu melaksanakan tugasnya dengan sempurna.
2. Terpuji artinya merupakan wujud etika moral yang mencerminkan ketakwaan, kesusilaan yang tumbuh dari hati nurani dan menghayati nilai-nilai Pancasila, Tribrata⁶ dan Hukum yang berlaku. Karakter terpuji merupakan hasil yang terungkap dalam sikap dan perilaku positif sehingga dapat menjadi panutan.

Patuh Hukum artinya merupakan wujud kesanggupan untuk berkorban dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan komitmen adanya kemauan keras untuk mengerti, menghayati dan mengamalkan semua peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat masyarakat setempat dan tunduk kepadanya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat tidak sebaliknya mengalami degradasi bahkan menurun.

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia

⁶ Tribrata, Kami Polisi Indonesia, Satu: Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dua: menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Tiga: senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Polri sebagai alat negara yang kompeten dalam memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat diwajibkan mampu untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut⁷, berbagai upaya telah ditempuh dengan metode dasar melalui reformasi birokrasi Polri.

Sejak era reformasi yang dicanangkan kurun waktu 1998, telah terjadi banyak perubahan penting di berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang selanjutnya menjadi tonggak dimulainya era reformasi. Perubahan ini dilandasi oleh semangat masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta masyarakat yang bermartabat menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya moment ini menjadi tonggak dimulainya proses reformasi birokrasi Polri secara global menuju Polri yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang mencakup 3 (tiga) aspek integral *bidang struktural, instrumental dan kultural*⁸. Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat harus bersifat humanis, berpenampilan menarik (bagi polwan muslimah mengenakan jilbab namun bukan suatu

⁷Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸Reformasi Birokrasi Polri polri telah mencanangkan program reformasi birokrasi guna mewujudkan harapan masyarakat menjadi “polri yang dipercaya, yang memberikan pelayanan prima, minimal zero complain, menjadikan polri unggul dan profesional.

keharusan, bagi laki-laki selayaknya tidak memelihara kumis dan jambang, ramah, empati, simpatik, dan perilaku terpuji lainnya. Pemakaian atribut polri sudah ada regulasi yang mengatur⁹. Senada dengan Keputusan Kapolri tanggal 25 Maret 2015 No Keputusan 245/III/2015 tentang diperbolehkannya polwan mengenakan jilbab¹⁰. Berjilbab merupakan bagian dari kebutuhan rohani sekaligus menjadi hak azazi manusia. Tentunya hal ini bukan suatu hal yang tidak lazim bagi polwan muslimah. Dengan mengenakan jilbab polwan akan terlihat meneduhkan hati, sejuk, serta sedap dipandang mata dan dengan berjilbab tetap bisa melakukan tugas pokok Kepolisian dengan baik.¹¹ Anjuran berjilbabpun sudah ditentukan Allah SWT sebagaimana dalam Alquran Surat An Nuur (24) ayat 31-32

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Keputusan Kapolri No. 245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang mengizinkan polwan terutama bagi yang beragama Islam untuk mengenakan jilbab.

¹¹ UU Kepolisian No 2 tahun 2002.

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Selanjutnya dalam Qs Al Ahzab (33) ayat 59

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,

karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menunjukkan orang yang tidak mengenakan jilbab akan lebih mudah digoda, karena jika seorang wanita tidak berjilbab maka orang-orang akan mengira bahwa ia bukan wanita ‘afifaat (wanita yang benar-benar menjaga diri atau kehormatannya). Secara umum polwan berpenampilan dengan mode potongan rambut pendek atau gaya shaggy, bob atau kekinian karena waktu itu belum adanya peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur diperbolehkannya mengenakan jilbab.

Penggunaan jilbab bagi polwan muslimah sudah cukup lama dilakukan yakni di daerah Nangroe Aceh Darussalam karena di daerah tersebut menerapkan hukum syariat Islam, sehingga lambat laun banyak anggota polwan muslimah untuk meneladaninya. Namun karena terbentur dengan belum disahkannya peraturan Kapolri sehingga jilbab dikenakan setelah mereka kembali dari berdinass. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polri Brigadir Jendral Polisi Ronny Franky Sompie.

Keputusan Kapolri yang mengatur tentang seragam Polwan berjilbab yang disahkan dengan Kep Kapolri Nomor : 245/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No Pol: SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Sedangkan Polisi Laki-laki (Polki) sampai saat ini belum ada Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur tentang penggunaan atribut muslim. Namun demikian belum juga ada larangan anggota polri muslim yang mengenakan peci atau surban saat melakukan tugas dalam pelayanan, sebagai bukti nyata yang penulis sampaikan perihal pemakaian atribut muslim bagi polki ini: Dijajaran Polresta Tangerang ribuan anggota polri tampil berbeda dengan mengenakan peci. Bukti pemakaian atribut muslim lain yang dilakukan Polri adalah Di Polda Jawa Timur juga dilakukan hal yang sama yaitu mengenakan kopiah hitam khas santri. Selanjutnya Kapolri kenakan peci hitam saat jumpa pers teroris. Dari atribut muslim yang dipakai polisi tersebut (jilbab, peci, sorban dan sarung) menunjukkan identitas sosok polisi yang agamis, soleh, dan humanis sehingga akan lebih melekatkan hubungan antara Polri dengan masyarakat.

Namun demikian Penggunaan atribut muslim ini biasa dilakukan sebatas memperingati perayaan hari besar Islam (memperingati Isro' Mi'roj, Maulud Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Hari Santri, dan kegiatan keagamaan Islam lainnya) yang bersifat insidental. Pemakaian atribut ini wujud dari implementasi pendidikan kerohanian Islam¹² sehingga akan lahir insan polri yang soleh, mahir, patuh hukum, terpuji dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Tugas pokok Polri termaktub dalam Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 selanjutnya Tribrata sebagai pedoman hidup polri dan Catur

¹² Ali' Abd al-Halim Mahmud, *Al Tarbiyah – al Ruhiyah*, (Al Qahirah Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1995), 45.

Prasetya¹³ sebagai pedoman kerja, keduanya sama-sama menjadi tuntutan dalam tugas polri namun Kesemuanya itu tetap berlandaskan kepada Alquran dan hadists, sehingga kinerja Polri dapat bernilai ibadah sebagaimana dalam Alquran Surat Ali Imron ayat 110

110. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Abu Hurairah r.a. mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia, kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, selanjutnya mereka masuk Islam. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyyah Al-Aufi, Ikrimah, Ata, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. *Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.* (Ali Imran: 110), Yakni umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia.

Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Selanjutnya ditekankan dalam Alquran Surat Al Maidah : 2¹⁴

2. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

¹³ Catur Prasetya sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk: Satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, Dua, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, Tiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum, Empat, memelihara perasaan tentram dan damai.

¹⁴ Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

Tafsir Ibnu Katsir Qs Al Maidah : 2

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hai ini dinamakan ketakwaan. Allah Swt. melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain

Dalam Alquran Surat At Taubah: 71

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, serta sebagian menjadi penolong yang lain bagi sebagian yang lain ini merupakan kalimat penjelas yang menunjukkan akan keharmonisan perdamaian, nasihat menasihati diantara sesama. Tidak ada saling menghakimi saling membanggakan diri dan merasa benar sehingga pantas dijadikan teladan. Islam menempatkan tugas Polri di tempat yang mulia, seluruh aktivitas dan setiap langkahnya

dalam memberantas kemungkaran merupakan nilai ibadah dan mewujudkan jihad yang utama menurut ajaran Islam.

Semangat implementasi kinerja Polri sebagaimana yang tersirat dalam Alquran maupun Hadits yang begitu nyata dan jelas. Hal ini sangat penting dibahas, karena semua manusia di dunia ini pasti memenuhi kebutuhan dasar hidup, membutuhkan makanan, sandang maupun papan sebagai kebutuhan dasar manusia. Manusia berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya dengan bekerja untuk mendapatkan yang diinginkan. Sehingga perlu diketahui, bahwa semua yang kita peroleh merupakan anugerah dan pemberian dari Allah SWT. Untuk itu, diperlukan usaha dalam memenuhi kehidupannya, baik yang bersifat materi maupun non-materi demi kelangsungan hidup manusia sehari-hari.

Manusia termotivasi untuk bekerja karena 3 hal, yaitu pertama menghasilkan uang, apabila uang menjadi alasan orang untuk bekerja, uang akan mendikte kinerja (mutu pekerjaan) dan produktivitas (hasil kerja) pekerjaan dengan kompensasi/imbalan finansial (uang) yang besar akan membuat si pekerja bersedia bekerja dengan jam kerja yang tinggi dan risiko yang besar juga.

Mereka tidak begitu peduli menyukai atau tidak jenis pekerjaannya, yang penting uangnya besar, yang kedua wujud aktualisasi diri, ada sebagian kecil orang lebih mengedepankan mengambil pekerjaan sebagai sarana aktualisasi diri (mengembangkan minat dan bakat) dibandingkan imbalan materi, “yang penting *happy* dan saya mencintai pekerjaan saya”, kata mereka. Orientasi mereka adalah terus mengasah dan mengembangkan potensi diri dengan mengambil jenis pekerjaan

yang mampu mengeksplorasi bakat dan hobi mereka sambil tentunya menghasilkan uang yang ketiga memberikan pelayanan/ ibadah, sebagian yang lain bekerja digunakan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Bukan imbalan materi, menyalurkan hobi atau pengembangan potensi yang dicari, melainkan makna hidup yang dijalani. Dengan kata lain, bukan kebutuhan materi, emosi yang ingin dipenuhi, melainkan kebutuhan spiritual atau rohani.¹⁵ Demikian juga anggota Polri sebagai manusia biasa.

Keberhasilan tugas dalam berdinamis dapat diukur dengan alat ukur yang telah dibakukan, demikianpun Kinerja anggota Polri dapat diukur dengan menggunakan sistem manajemen kinerja (SMK)¹⁶ sehingga anggota dapat diberikan kesempatan dalam pendidikan karir, pengembangan, kenaikan pangkat serta pemberian tunjangan kinerja.

Salah satu misi Polri adalah mengelola SDM Polri secara profesional dalam mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan SDM Polri. Dengan adanya misi yang menyentuh aspek sumber daya manusia.

Polri telah berupaya untuk berkomitmen terhadap kualitas kompetensi yang baik bagi para anggotanya. Pengembangan

¹⁵ Edi Susanto, *100 Pikiran yang Mencerahkan dan Memperkaya Hidup*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media & Remaja Rosdakarya Cetakan I Tahun 2010), hal. 30.

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 tentang penilaian kinerja bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sistem manajemen kinerja.

kemampuan, kekuatan, dan penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.

Salah satu Polres yang *concern* terhadap peningkatan kinerja dengan pendekatan pendidikan kerohanian Islam adalah di Polres Kulonprogo. Polres Kulonprogo institusi polri dengan segudang prestasi yang telah dicapai baik tingkat lokal maupun nasional diraih secara perorangan, kelompok, satuan, bagian maupun institusi Polres itu sendiri. Keberhasilan prestasi ini tidak luput dari dampak Pendidikan kerohanian Islam. Semangat dalam beribadah anggota polres Kulonprogo sebagai wujud sukur yang diterapkan dalam pengamalan gairah kinerja anggota polri yang terpatri dalam sanubari berlandaskan pada Alquran dan Hadits. Sehingga bekerja merupakan ladang beramal soleh untuk menanamkan kebajikan. Pendidikan kerohanian Islam yang dikembangkan oleh Polres Kulonprogo sebenarnya sudah ada dan dilaksanakan oleh Polres lain maupun ditingkat polda dan mabes Polri. Polres Kulonprogo memasukkan metode pendidikan rohani Islam melalui konsultasi, bimbingan dan penyuluhan, diskusi, ceramah.

Berbagai pihak telah mengakui “keberhasilan” dari Polres Kulonprogo melalui pendidikan kerohanian Islam dalam meningkatkan kinerja sebagai bukti beberapa pernyataan berikut ini.

1. Bupati Kulonprogo menyatakan pada kurun waktu 2017-2018 Polres Kulonprogo telah berhasil menorehkan beragam prestasi mulai dari anggota, pimpinan dan institusi. Sebagai contoh keberhasilan anggota polri adalah

2. Koran Kedaulatan Rakyat memberitahukan bahwa Polres Kulonprogo meraih penghargaan Kementerian PAN-RB
3. Penghargaan dari Ombudsman terkait layanan publik dalam bidang pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)¹⁷
4. Penghargaan dari Gubernur DIY sebagai satuan kerja berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran 2017¹⁸
5. Penghargaan satuan fungsi berprestasi yakni fungsi Sat Intelkam

Berdasarkan dari data dan uraian di atas menjadikan penulis tertarik menelusuri lebih dalam perihal kinerja yang dispesifikasikan terhadap pendidikan kerohanian Islam.

Pendidikan kerohanian Islam sebagai pengembangan kinerja anggota polri yang dijadikan penulis obyek penelitian adalah Polres Kulonprogo. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penulis memfokuskan pada pendidikan kerohanian Islam diantaranya:

1. Pada Polres Kulonprogo pendidikan kerohanian Islam merupakan program yang cukup signifikan
2. Pada pendidikan kerohanian Islam tersebut memiliki manajemen pengelolaan, pembinaan, konseling yang cukup sistematis terbukti dengan terus diterapkannya ide-ide baru demi terbentuknya perilaku anggota Polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
3. Pada Polres Kulonprogo sebagian besar anggota yang berdinis adalah muslim dan berdomisili di Kulonprogo
4. Anggota Polri di Polres Kulonprogo memiliki kepedulian sosial terhadap sesama.

¹⁷ Koran TribunJogja.com tanggal 14 Desember 2017

¹⁸ Ibid

5. Lokasi yang dekat dengan Polres Kulonprogo, sehingga hubungan emosional dengan anggota Polres lebih dekat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti meliputi:

1. Bagaimana kinerja anggota polri di Polres Kulonprogo?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kerohanian islam anggota polri di Polres Kulonprogo
3. Bagaimana model pendidikan kerohanian Islam yang diterapkan di Polres Kulonprogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui kinerja anggota polri di Polres Kulonprogo.
 - b. Mengkaji pelaksanaan pendidikan kerohanian islam anggota polri di Polres Kulonprogo.
 - c. Menemukan model pendidikan kerohanian Islam terhadap peningkatan kinerja anggota Polri di Polres Kulonprogo.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih baik secara teoretik maupun praktis.

Secara teoritik ini bermanfaat sebagai berikut :

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang kajian Psikologi Pendidikan Islam khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan kerohanian Islam sebagai pengembangan kinerja anggota Polri.

- b. Menambah referensi keilmuan perihal metode pendidikan kerohanian Islam sebagai pengembangan kinerja anggota Polri di Polres Kulonprogo DIY.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak penelitian selanjutnya, yang mampu memperbaiki dan melengkapi kekurangan dan kelemahan dari penelitian ini.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, secara individu hasil penelitian ini bermanfaat untuk penambah wawasan keilmuan secara kognisi, afeksi dan psikomotor yang berkaitan dengan kinerja dan pendidikan rohani Islam.
- b. Bagi pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang Psikologi Pendidikan Islam dari aspek pendidikan kerohanian Islam sebagai peningkatan kinerja .
- c. Bagi Polres Kulonprogo sendiri, hasil penelitian ini dijadikan penegas untuk tetap mengembangkan metode pendidikan kerohanian Islam sebagai pengembangan kinerja anggota Polri di Polres Kulonprogo. Disamping itu juga menjadi acuan bagi anggota polri diseluruh indonesia.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis merujuk pada beberapa penelitian pendahulu, disertasi, dan buku lain yang ada kaitannya dengan kinerja yang didalamnya terdapat unsur pendidikan kerohanian Islam sebagai *entry point dari disertasi ini*. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian di Polsek Cakung Jakarta Timur oleh Khanza Putri Saharazad, Ade Irma Susanty dalam *e-Proceeding of Management: Vol. 3, No. 2 Agustus 2016*, Hasil analisis deskriptif variabel Motivasi *Need for Achievement*, *Need for Power*, dan *Need for Affiliation* termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai persentase secara keseluruhan sebesar 80%, sedangkan variabel kinerja anggota kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai persentase sebesar 87%. *Need for Achievement*, *Need for Power* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Besar pengaruh motivasi terhadap kinerja anggota kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur adalah sebesar 36,4%.

Dalam Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi Volume 2 Nomor 1, April 2013 oleh Lina Febrianti dan Herdian Maulana dengan judul "*Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Kinerja Kepolisian Terhadap Kepercayaan Pada Kepolisian*". Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa jumlah masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap kepolisian lebih banyak daripada masyarakat yang memiliki persepsi positif. Kepercayaan masyarakat pada kepolisian berdasarkan penelitian ini berada pada tingkatan

kepercayaan sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat pada kinerja kepolisian terhadap kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Pengaruh persepsi masyarakat pada kinerja kepolisian terhadap kepercayaan masyarakat pada kepolisian memiliki hubungan yang positif.

Roza Agustika dalam e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 dengan judul “*Pengaruh Pemberian Remunerasi Terhadap Kinerja Anggota Polri Polres Pasaman (Studi Kasus Anggota Polri yang Berpangkat Bripda s/d Bripka)*”. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pemberian remunerasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota Polri Polres Pasaman, artinya setiap peningkatan remunerasi akan meningkatkan kinerja dari anggota Polri Polres Pasaman dengan persamaan analisis regresi linear sederhana diperoleh $Y=3,753+0,076 X$. Ini dapat dinyatakan dengan apabila terjadi peningkatan remunerasi sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan kinerja sebesar 0,076. Apabila terjadi penurunan remunerasi sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 0,076. Apabila remunerasi diasumsikan nol atau tidak ada, maka kinerja anggota Polri tetap sebesar konstanta yaitu 3,753. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal yang terlihat dari uji normalitas dengan nilai signifikan dari variabel remunerasi dan kinerja lebih besar dari 0,05.

Penelitian Andi M. Indra Waspada dengan judul “*Optimalisasi Kinerja Anggota Satlantas Polres Jepara*” dalam jurnal *EKOBIS*, Vol.16, No.1, Januari 2015: 12-26. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota Satlantas Polres Jepara dapat dioptimalkan melalui peningkatan iklim organisasi yang baik, motivasi kerja, komunikasi,

kepercayaan dan kepuasan kerja. Adanya pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja maka indikator-indikator variabel iklim organisasi dalam penelitian ini (kesesuaian tujuan, kepemimpinan yang mendukung, pengambilan keputusan partisipatif, pertumbuhan profesional, dan hubungan profesional) dapat diterapkan sebagai acuan dalam menciptakan kondusifitas iklim organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja anggota Satlantas Polres Jepara. Organisasi Satlantas Polres Jepara lebih bersifat komando dalam kepemimpinannya, menjadikan responden kurang memiliki keleluasaan dalam memberikan pendapatnya secara terbuka dalam penelitian ini, sehingga banyak jawaban yang bersifat ambigu.

Firman Santya dengan judul "*Kinerja Aparatur Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Berau Dalam Mencegah dan Memberantas Kriminalitas di Kabupaten Berau*" dalam *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5 , Nomor 1 , 2017: 5604-5613. Adapun temuan dari penelitian ini diketahui bahwa Kinerja Aparatur Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Berau dalam Mencegah dan Memberantas Kriminalitas di Kabupaten Berau belum berjalan dengan baik dalam produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari penanganan sebuah kasus aparat Polres Berau masih terkesan lamban dan tidak cepat tanggap, kurangnya program-program yang dilaksanakan, dan kurang disiplinnya aparat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, selain itu penghambat yang dihadapi adalah dana operasional yang dianggap kurang memadai untuk mendukung kegiatan dalam mencegah dan memberantas kriminalitas di Kabupaten Berau.

Jon M. Sane dalam *Journal of Criminal Justice*, July 2010 dengan judul “*Organizational stressors and police performance.*” Hasil dari penelitian ini menyiratkan perlu ada perubahan struktural dalam organisasi kepolisian. Penelitian yang akan datang harus meneliti kembali kinerja polisi di lembaga kepolisian yang lebih kecil dan menengah serta lembaga pinggiran kota dan pedesaan dan memperluas wilayah peserta untuk menyertakan pejabat yang kuat dan personil sipil.

Paul-Philippe Pare dalam *International Criminal Justice Review*, Vol 24, Issue 3, 2014 dengan judul “*Indicators of Police Performance and Their Relationships With Homicide Rates Across 77 Nations*”. Hasilnya menunjukkan bahwa indeks kinerja polisi sangat terkait dengan tingkat pembunuhan yang lebih rendah, mengendalikan tingkat pembangunan sosial ekonomi, masalah ekonomi (kemiskinan-ketidaksetaraan), demokrasi, dan penahanan. Mereka juga menunjukkan bahwa kinerja polisi sepenuhnya memediasi hubungan antara pembangunan sosial-ekonomi dan pembunuhan. Dengan demikian, negara yang lebih kaya dan lebih maju mungkin memiliki tingkat pembunuhan yang lebih rendah karena mereka memiliki polisi yang lebih baik. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa kepolisian yang baik penting untuk kriminologi lintas negara, di samping faktor sosial dan ekonomi. Akhirnya, indeks kinerja polisi baru disediakan untuk penelitian masa depan.

Mark H. Moore dan Anthony A, Braga, dalam *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 26 Issue: 3, 2003 dengan judul “*Measuring and improving police performance: the lessons of Compstat and its progeny*”. Penelitian

ini mengungkapkan tentang bagaimana petinggi kepolisian ingin mengukur kinerja, menjelaskan bagaimana pengukuran itu penting dalam mendorong perubahan organisasi, membahas apa yang harus diukur oleh departemen kepolisian, dan menyajikan analisis kualitatif eksplorasi dari mekanisme yang bekerja di Compstat Departemen Kepolisian New York dan aplikasi di enam departemen kepolisian lainnya.

Wuthichai Tengpongsthorn dalam *Kasetstart Journal of Social Sciences*, Volume 38, Issue 1, January–April 2017 dengan judul “*Factors affecting the effectiveness of police performance in Metropolitan Police Bureau*”. Hasil dari penelitian menemukan bahwa faktor motivator dan faktor kebersihan memiliki hubungan positif dengan efektivitas kinerja. Petugas Kepolisian Metropolitan di semua divisi merasa kuat bahwa peralatan yang cukup merupakan faktor yang memfasilitasi peningkatan kinerja, sedangkan ketidakseimbangan tenaga kerja dan kelangkaan peralatan modern adalah faktor-faktor yang menghambat kinerja.

Sutham Cheurprakobkit dalam *Journal of Criminal Justice*, Volume 28, Issue 4, July-August 2000, dengan judul “*Police-citizen contact and police performance Attitudinal differences between Hispanics and non-Hispanics*”. Analisis data didasarkan pada survei telepon terhadap 251 penduduk di Odessa dan Midland, Texas, yang pernah berhubungan dengan polisi. Di antara temuan-temuan yang signifikan adalah: (1) warga yang melakukan kontak polisi lebih banyak melihat kinerja polisi daripada mereka yang kontaknya diprakarsai oleh polisi; (2) kontak polisi kemungkinan akan dihasilkan dari aspek layanan kepolisian lebih dari fungsi kejahatan-pertempuran,

dan pengalaman polisi yang positif tidak hanya menghasilkan sikap positif terhadap polisi, tetapi juga dinetralkan atau memperbaiki sikap negatif warga negara; (3) meskipun tidak secara signifikan demikian, Hispanik yang berbahasa Spanyol merasa lebih puas dengan kinerja polisi daripada orang kulit putih dan Hispanik berbahasa Inggris; dan (4) Orang kulit hitam memiliki sikap yang kurang baik terhadap polisi daripada orang kulit putih atau dua kelompok Hispanik. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan polisi yang tepat harus diterapkan untuk menciptakan kontak polisi-warga yang positif dan untuk meningkatkan hubungan dengan polisi minoritas.

John T. Krimmel dalam *American Journal of Police*, Vol. 15 Issue: 1, 1996 dengan judul “*The performance of college-educated police: a study of self-rated police performance measures*”. Penelitian ini memberikan gambaran dari 250 petugas yang diminta untuk melengkapi formulir penilaian diri, petugas dengan gelar sarjana menilai diri mereka lebih tinggi dalam sejumlah indikator kinerja daripada mereka yang tidak memiliki gelar. Tunjukkan bahwa hasilnya mungkin menunjukkan bahwa petugas yang berpendidikan memiliki kinerja yang lebih baik, atau mungkin menunjukkan perbedaan dalam persepsi tentang tugas mereka. Apapun masalahnya, pendidikan memberikan keuntungan dari keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang lebih baik. Merekomendasikan penggunaan kuesioner yang dikelola sendiri untuk menyediakan data untuk pembuatan kebijakan.

Michael D. Reisig dalam *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 20 Issue: 2, 1997 dengan judul “*Public evaluations of police performance: an analysis across three*

levels of policing". Penelitian yang berfokus pada sikap warga AS terhadap polisi telah terkonsentrasi pada lembaga-lembaga pemolisian kota, mengabaikan berbagai sikap terhadap polisi kabupaten dan negara bagian. Upaya untuk mengisi kekosongan ini dengan menguji pengaruh variabel individu dan kontekstual pada evaluasi warga dan kinerja polisi di seluruh tingkat kota, kabupaten dan negara menggunakan data yang dikumpulkan dari negara bagian di Amerika Serikat bagian barat. Menemukan perbedaan dalam evaluasi tergantung pada usia, jenis kelamin, inisiasi kontak dan pengalaman sebelumnya. Membahas implikasi dari hasil ini dan menyarankan topik untuk penelitian lebih lanjut.

William J. Bratton Sean W. Malinowski dalam *Policing: A Journal of Policy and Practice*, Volume 2, Issue 3, 1 January 2008 dengan judul "*Police Performance Management in Practice: Taking COMPSTAT to the Next Level*". Dalam artikel ini, peneliti mempertimbangkan manajemen kinerja polisi dalam praktik, melalui kacamata pengalaman Kepala Bratton sendiri untuk mengurangi kejahatan di New York dan Los Angeles. Dengan mengukur kinerja para manajer polisi sambil menahan mereka untuk mempertanggungjawabkan kejahatan, mereka menjelaskan peran COMPSTAT yang dimainkan dalam memerangi kejahatan di bidang-bidang ini dan melihat ke depan untuk melihat bagaimana polisi dapat terus berinovasi dan memperluas ukuran kinerja polisi yang ada.

Selanjutnya Thomas B Priest dan Deborah Brown Carter dalam *Journal of Criminal Justice*, Volume 27, Issue 5, September-October 1999 dengan judul "*Evaluations Of Police Performance in An African American Sample.*" Penelitian telah menunjukkan bahwa anggota

kelompok minoritas umumnya kurang memiliki sikap positif terhadap polisi daripada kulit putih. Penelitian ini menguji evaluasi kinerja polisi di antara sampel orang Amerika Afrika. Analisis regresi menunjukkan bahwa usia, pendidikan, viktimisasi, evaluasi responden terhadap keselamatan lingkungan mereka, evaluasi mereka terhadap lingkungan mereka, dan evaluasi mereka tentang waktu respon polisi sampai ke lingkungan mereka semuanya memiliki dampak signifikan terhadap evaluasi kinerja polisi setempat. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang menekankan konteks lingkungan dari evaluasi kinerja polisi setempat. Mereka juga menunjukkan bahwa evaluasi waktu respon polisi merupakan faktor yang signifikan dalam evaluasi kinerja polisi di kalangan orang Amerika Afrika.

Oleh karena itu, fokus penelitian yang sedang penulis susun ini mengkaji aspek pendidikan kerohanian Islam dan pengembangan kinerja dengan meninjau aspek psikologi pendidikan yang lebih luas. Adapun aspek psikologi pendidikan yang dimaksud adalah pembentukan pendidikan kerohanian Islam, proses pendidikan kerohanian Islam, dan model pendidikan kerohanian Islam.

E. Kerangka Teori

Pada bab ini, peneliti akan membahas berbagai literatur yang menjadi landasan untuk analisa pada bab terakhir. Berbagai literatur merupakan konsep-konsep yang dibentuk baik melalui penelitian terdahulu maupun wacana-wacana kebaruan. Poin utama yang dikaji merupakan tema besar yang kemudian mengerucut menjadi tema-tema kecil.

Beberapa tema yang dibahas antara lain; kinerja kepolisian yang memuat kajian kinerja dan problematikanya sehingga menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi kepolisian.

Konsep lain yang dikaji adalah pendidikan kerohanian rohani Islam, yang pada akhirnya mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara berdasarkan Alquran dan Hadis dalam pengembangan kinerja kepolisian di Polres Kulon Progo, serta metode yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulonprogo. Berikut merupakan pemaparan yang disampaikan peneliti berkaitan dengan kajian teori dari penelitian ini.

1. Pendidikan Islam

Beragam arti dan definisi pendidikan telah dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Meskipun rumusan tentang pendidikan tersebut sangat bergantung pada subyektifitas masing-masing perumus, namun sebagai langkah awal untuk memahami sebuah konsep, definisi masih tetap diperlukan.

a. Pendidikan Islam

Pendidikan secara bahasa berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenal akhlak dan kecerdasan pikiran.¹⁹ Dari kata dasar didik yang mendapat

¹⁹ Qonita Alya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, (Bandung: Indahjaya Adipratama, 1990), hal. 157.

awalan pe- dan akhiran -an yang berarti ajaran, tuntunan, pimpinan.²⁰ Berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa di atas, maka pendidikan berarti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik²¹ secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.²²

Pendidikan Islam menegaskan beberapa prinsip antara lain; pertama, mencakup semua dimensi manusia sebagaimana ditentukan oleh Islam. Kedua, menjangkau kehidupan di dunia dan akhirat secara seimbang. Ketiga, memperhatikan manusia dalam semua gerak kegiatannya, serta mengembangkan padanya daya hubungan dengan orang lain. Keempat, berlanjut sepanjang hayat, mulai dari manusia sebagai janin dalam kandungan ibunya, sampai berakhirnya hidup di dunia. Dengan melihat ungkapan tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam akan menghasilkan manusia yang memperoleh hak di dunia dan di akhirat.²³ Adapun tujuan pendidikan Islam adalah membina

²⁰ Suryani, *Hadits Tarbawi; Analisis Paedagogis Hadits-Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 136.

²¹ Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Selibuhnya istilah-istilah praktis Pendidikan seperti jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan juga telah juga telah diputuskan dalam UU SISDIKNAS BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1).

²³ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: YPI Ruhama, Cet. 1, 1996), hal. 35.

manusia agar menjadi hamba Allah yang saleh dengan seluruh aspek kehidupannya, perbuatan, pikiran, dan perasaannya.²⁴

Menurut Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan *fitrah* manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.²⁵

Masih banyak lagi pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, namun dari sekian banyak pengertian pendidikan Islam yang dapat kita petik, pada dasarnya pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan *fitrah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (*insan kamil*) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan di akherat.

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara terperinci dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan orang tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan *fitrah* manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu

²⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan ...*, hal. 35.

²⁵ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya media, 1992), hal. 14.

kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.

b. Landasan Pendidikan Islam

Pendidikan kerohanian Islam sangat kosen terhadap penataan individu dan sosial yang bertujuan untuk mengarahkan individu ke dalam perilaku terpuji. Oleh karena itu landasan pendidikan Islam bersumber pada Alquran dan As Sunnah.²⁶

1) Alquran

Alquran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang berlaku memuat berbagai ajaran tentang pendidikan misalnya di dalam Alquran Surat Al Lukman (31) ayat 12-15, As-Shaffaat : 102, Ar Rahman ayat 1-4, Al Kahf (18) ayat : 66, As-Syu'ara (26) ayat 214, 'Abasa (80) ayat 1-3, Al Ankabut (29) ayat 19-20, Al 'Alaq (80) ayat 1-5. At Taubah (09) ayat 122, An Nahl (16) ayat 125, Al A'raf (7) ayat 35, Ar Rahman (55) ayat 47-48, Al Baqarah (2) ayat 31.

2) As Sunnah

Selanjutnya pendidikan Islam pun mengacu kepada sunnah Rasul diantaranya: Hadits Anas bin Malik tentang metode diskusi yang artinya: dari Anas bin Malik ra, *ia berkata: Rasulullah telah bersabda: tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Mereka bertanya: wahai Rasulullah bagaimana menolong orang zalim? Rasulullah menjawab tahanlah (hentikan) dia dan kembalikan dari kezaliman, karena sesungguhnya itu merupakan pertolongan*

²⁶ Abdurrahman an Nahlawi, *Pendidikan Islam di rumah, sekolah dan masyarakat*, Gema Insani Press, Jakarta, hal 28.

kepadanya. H.R Abu Abdillah Mohammad bin Ismail al Buchori al Ju'fi.²⁷

Hadits dari Abu Hurairah tentang metode tanya jawab yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata: *ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW kemudian ia bertanya: "wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak saya hormati?. Beliau menjawab kemudian "ibumu", ia berkata kemudian siapa? Beliau menjawab kemudian "ibumu" ia berkata kemudian siapa? Beliau menjawab kemudian bapakmu dan saudara-saudara dekatmu.* (H.R Muslim bin al-Hijaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi.²⁸

Hadits Anas bin Malik tentang membuat kabar gembira yang artinya : dari Anas bin Malik dari Nabi SAW *"mudahkanlah dan jangan kamu persulit gembirkanlah dan jangan kamu membuat lari"* (H.R. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Buchori al-Ju'fi²⁹

Hadits Ibnu Abbas ra. Rasulullah SAW pernah menasehati seseorang *"manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara"* (1) waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu (2) waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu (3) masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, (4) masa luangmu sebelum datang masa sempitmu (5) hidupmu sebelum datang matimu (H.R. Al Hakim dalam Al Mustadroknnya 4: 341).

²⁷ Ahmadi Toha, Op.cit, hlm. 217

²⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Dar al-Kutub Al –Amaliyah juz 10, 1994) halaman 1

²⁹ Ahmad Toha, Terjemah Sahih Bukhori (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986) hlm. 89

2. Pendidikan Kerohanian Islam

Pengertian rohani secara etimologi, kata rohani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1) roh, 2) berupa roh yang bertalian dengan yang tidak berbadan jasmani. Kerohanian berarti sifat-sifat rohani; perihal rohani. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* dijelaskan rohani adalah kondisi kejiwaan seseorang dimana terbentuk dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam budi pekerti seseorang serta melalui hubungan manusia dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.³⁰

Rohani Islam berasal dari dua kata yaitu Rohani dan Islam. Secara etimologis, “*Islam*” berasal dari bahasa Arab, diderivasikan dari “*salima*” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk *aslama* yang berarti “memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa”, dan juga berarti “menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat”. Kata “*aslama*” itulah yang menjadi kata pokok dalam “*Islam*”, mengandung segala arti yang ada dalam arti pokoknya.³¹

Dari pengertian di atas, dapat didefinisikan bahwa arti pendidikan rohani Islam adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan kegiatan dalam membentuk, memelihara serta meningkatkan kondisi rohani seseorang terhadap pengalaman nilai-nilai ajaran agama Islam, serta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

³⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1998), hal. 13.

³¹ M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hal. 29.

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara berdasarkan alquran dan Hadis.

Beberapa tokoh spiritual Islam pada abad pertengahan (Abad V Hijriyah) telah merumuskan beberapa konsep tujuan pendidikan rohani antara lain: al-Ghazali dan ‘Abd al-Qadir al-Jilani. Menurut al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan pada mendekatkan diri pada Allah SWT, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan permusuhan.³²

3. Kinerja Kepolisian

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”.³³ Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.³⁴

Istilah kinerja juga diartikan sebagai hasil kerja yang dapat ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

³² Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Falasifatuha*, (Mishr: Isa al-Bab al-Halabi, 1975), hal. 73.

³³ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 191.

³⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 19.

diberikan.³⁵ Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral³⁶ dan etika. Menurut Abd. Madjid kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.³⁷

Menurut Gibson dkk., kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸ Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³⁹ Sehingga, kinerja merupakan hasil kerja individu dalam mencapai persyaratan pekerjaannya.⁴⁰

Lawler dan Porter menyatakan kinerja adalah keberhasilan pencapaian peran yang diperoleh seseorang atas apa yang diperbuatannya (As'ad, 1991). Lebih lanjut Dessler (1997), menyatakan kinerja merupakan suatu prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar

³⁵ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 67.

³⁶ Suryadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 2.

³⁷ Abd. Madjid, *Pengembangan Kinerja Guru Melalui : Kompetensi, Komitmen, dan Motivasi Kerja*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), hal. 11.

³⁸ J.F.L. Gibson, dkk., *Fundamental of Management*, (Chicago: Irwin, 1995), hal. 118.

³⁹ Fatah N., *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)

⁴⁰ Henry Simamora, *Manajemen ...*, hal. 433.

kerja yang ditetapkan. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.⁴¹

Kinerja sebagai *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.⁴²

Menurut Donnely dkk⁴³, kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung makna bahwa kinerja akan baik jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kinerja adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴⁴

⁴¹ Joko Widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 78

⁴² Bernardin and Russel, *Human resources Management*, (New York: Prentice Hall, 1993), hal. 379; Lihat: Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi ...*, hal. 192.

⁴³ Donnely, J H., J F. L. Gibson, and J M. Ivancevich, *Fundamental of Management*, (Chicago: Irwin, 1995), hal. 118.

⁴⁴ Nanang Fattah, *Landasan ...*, hal. 18.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif⁴⁵. Alasan yang mendasari peneliti menggunakan metode kualitatif.⁴⁶ Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesa dan menguji kebenarannya walaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada saat ada suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi. Upaya eksplorasi diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah diukur. Penelitian kualitatif juga dilakukan karena seseorang membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap dengan permasalahan tertentu.⁴⁷

Metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengobservasi fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung dan melakukan interview secara mendalam dengan informan. Fenomena yang diobservasi meliputi individu yang mengikuti pendidikan kerohanian Islam dan peningkatan kinerja dalam

⁴⁵Lescy J.Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya Bandung, 2008, hlm.8.

⁴⁶Asmadi Alsas menjelaskan bahwa kajian psikologi juga dapat menggunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa manusia sebagai subjek penelitian dalam ilmu ini adalah makhluk yang aktif, yang memiliki kebebasan berkemauan sehingga perlu didekati dengan kajian kualitatif untuk memahaminya. Asmadi Alsas, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 12.

⁴⁷John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 63.

mengikuti kegiatan tersebut. Semua proses yang dieksplor meliputi peningkatan kinerja anggota Polres Kulonprogo.

2. Penentuan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Resort (Polres) Kabupaten Kulonprogo yang berada di Jl. Jogja-Ngramang, Pengasih, Kulonprogo. Polres Kulonprogo merupakan bagian dari Polda DIY dimana Polres Kulonprogo ini memiliki 12 Polsek di setiap wilayah/kecamatan. Polres Kulonprogo dipimpin oleh seorang Perwira Menengah berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) dengan memiliki kekuatan anggota sejumlah 1.092 anggota.⁴⁸ Kepedulian Kepolisian Resor (Polres) Kulonprogo terhadap pendidikan rohani Islam ditandai dengan terbentuknya pembinaan mental kerohanian terhadap anggota.

Program ini telah ada sejak tahun 2017, sebagai upaya mewujudkan anggota Polri yang profesional dan berbudaya serta mampu mengimbangi tingkat pendidikan masyarakat.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini memerlukan subjek-subjek penelitian yang dijadikan sebagai informan atau yang memberi informasi terkait perihal kinerja Kepolisian dan pendidikan rohani Islam di Polres Kulonprogo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang tepat.⁴⁹

⁴⁸ Sumber Data dari SDM Polres Kulonprogo 2018

⁴⁹ Hasan M. Tholchah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA, 2003), hal. 142.

Populasi dari penelitian adalah seluruh personil di Polres Kulonprogo berjumlah 1092 orang, dengan jumlah personil yang beragama Islam 1026 orang. Subjek penelitian ini terdiri atas perwira menengah, perwira pertama, dan Bintara yang berjumlah 20 orang⁵⁰ Sampel penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel strata atau *stratified sampling* ditetapkan besarnya sampel sebanyak 22,7% yang meliputi strata perwira dan 77,3% strata Bintara.

a. Adapun informan atau subjek penelitian di antaranya: Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara Tinggi, serta Brigadir Polri di Polres Kulonprogo. Informasi yang diperoleh dari para informan selanjutnya direduksi, di cek kesahihannya serta di interprestasikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan malah. Adapun subyek penelitian ini meliputi :

1) Perwira menengah :

- a) AKBP Irfan Rifa'i, SH,S.I.K, M.M kapolres Kulonprogo
- b) Kompol Dedi Suryadharma, SH,S.I.K, M.M Wakapolres Kulonprogo.
- c) Kompol Bambang Harun Kapolsek Nanggulan
- d) Kompol Haryoduto, S.I.K Kabag Sumda Polres Kulonprogo.
- e) Kompol Wakijan Anjak Polres Kulonprogo

2) Perwira Pertama

- a) AKP Sumina, SH, Kasad Bimas Polres Kulonprogo
- b) AKP Maryanto, SH, Kasatlantas Polres Kulonprogo

⁵⁰ Sumber Data dari SDM Polres Kulonprogo 2018

- c) IPTU Edi Purnama, SH Kasiwas Polres Kulonprogo
 - d) IPDA Wijanarko Paur Renmin II Bag Sumba Polres Kulonprogo
 - e) IPDA Agus Kusnendar Kanit Laka Polres Kulonprogo
 - 3) Bintara Tinggi (BATI)
 - a) AIPTU Siti Mustami, Panit Bimas Polres Kulonprogo
 - b) AIPTU Agus Suparjo, Panit Bimas Polres Kulonprogo
 - c) AIPTU Sudibyoy, PS Patroli Polres Kulonprogo
 - d) AIPDA Heru Triyanto, PS KDRT Satreskrim Polres Kulonprogo
 - e) AIPDA Karmanto, Bintara Propam
 - 4) Brigadir
 - a) Briпка Purwanto, Anggota Telematika Polres Kulonprogo
 - b) Briпка Susanto, Anggota Satbimas Polres Kulonprogo
 - c) Briпка Cerri Andra Anggota Humas Polres Kulonprogo
 - d) Brigadir Rumiyanto, Anggota Siwas Polres Kulonprogo
 - e) Brigadir Siswanto, Anggota Sat Intel Polres Kulonprogo
4. Metode Pengumpulan Data

Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan sedangkan penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap subyek penelitian. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku pustaka yang dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama yang langsung meneliti di lapangan serta berusaha

untuk mengumpulkan data dengan observasi baik observasi langsung maupun observasi terlibat (*participant observation*), wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian kualitatif ini penulis lebih memfokuskan wawancara karena penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh yakni persepsi dari nara sumber yang telah ditentukan. Agar peneliti bisa mengeksplorasi alur pikiran subjek maka pokok pertanyaan dirancang berbentuk pertanyaan terbuka, mudah dipahami, dan tidak mengintervensi subjek.

Tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menurut Creswell perlu divisualisasikan sesuai dengan fase aktivitas yang akan dilakukan supaya proses yang ditempuh menjadi lebih terarah. Adapun aktivitas yang dimaksud adalah usaha dan proses dalam menentukan tempat atau individu, memperoleh akses dan membangun relasi, melakukan sampling, mengumpulkan data, merekam informasi, pemecahan persoalan di lapangan dan menyimpan data.⁵¹

a. Observasi

Pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah dengan cara observasi. Kegiatan observasi ini ditempuh melalui tiga bagian, yaitu: mengamati, mencatat, dan membuat inferensi atau kesimpulan.⁵² Pengumpulan data dilakukan secara detail mulai dari hal yang umum sampai pada hal-hal kecil yang diperlukan, kegiatan ini langsung dilanjutkan dengan pencatatan di tempat. Pencatatan dapat dilakukan secara manual pada buku

⁵¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif ...*, hal. 206.

⁵² Sulisworo Kusdiyanti dan Irwan Fahmi, *Observasi Psikologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 5.

catatan yang telah dipersiapkan dan juga dapat direkam dengan kamera. Pencatatan tersebut langsung ditemukan makna atau kesimpulan sementara di tempat dan bisa juga ditemukan kemudian setelah dihubungkan dengan fenomena-fenomena lainnya.

Adapun hal-hal yang akan diamati di lapangan adalah setingan tempat, baik itu di dalam masjid, lingkungan luar masjid dan sekitarnya, ruang kantor, kemudian mengamati semua aktivitas yang berhubungan dengan kinerja baik yang di dalam ruangan maupun di luar ruangan kerja. Selanjutnya mengamati pendidikan kerohanian Islam anggota Polri di Polres Kulonprogo. Demikian juga dengan peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan. Dalam proses observasi, peneliti tidak hanya bersikap sebagai outsider, namun akan menjadi insider untuk membangun keakraban dengan seluruh anggota Polres Kulonprogo.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa cara guna memperoleh informasi sebanyak mungkin. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak terstruktur, semi terstruktur, terbuka, secara individu dan secara kelompok. Dalam menyimpan hasil wawancara, peneliti telah mempersiapkan alat berupa perekam dan catatan-catatan. Adapun informasi utama yang ingin digali melalui wawancara adalah proses pendidikan kerohanian Islam, kinerja sebelum adanya pendidikan kerohanian Islam, peningkatan kinerja setelah dilakukan pendidikan kerohanian Islam. Penentuan partisipan dalam

penelitian dilakukan dengan model *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan keterikatannya dengan peneliti.

Adapun pihak-pihak terkait yang berhubungan erat terhadap penelitian ini, seperti; Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara Tinggi, serta Brigadir Polri di Polres Kulonprogo. Wawancara terhadap subjek penelitian menyangkut tentang bagaimana awal mula kegiatan pendidikan rohani Islam di Polres Kulonprogo. Selain itu, munculnya pertanyaan perihal bagaimana pendidikan rohani Islam dalam pengembangan kinerja kepolisian di Polres Kulonprogo.

c. Dokumen

Menurut Burhan Bungin metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis⁵³. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁵⁴. Metode dokumentasi adalah cara menyelidiki benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat dan data lain sebagainya.⁵⁵

Analisis dokumen dilakukan dalam penelitian ini untuk melengkapi dan menunjang setiap informasi yang telah

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 121.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hal. 82.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 124.

diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selain mempelajari dan menganalisa dokumen yang diperoleh di Polres Kulonprogo, peneliti sendiri juga mempersiapkan segala dokumen yang didapat selama penelitian baik berupa foto, notulen dan hasil wawancara berupa catatan dan transkrip serta lainnya.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Adapun cara yang ditempuh dalam proses triangulasi adalah dengan menghubungkan hasil observasi dengan hasil wawancara atau dengan data dari hasil dokumentasi. Demikian juga dengan hasil wawancara satu orang akan dikaitkan dengan partisipan lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi partisipan peneliti bukan hanya anggota Polisi saja, tetapi juga non Polisi seperti *cleaning service*, petugas kantin, dan masyarakat umum.

5. Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pada dasarnya tujuan dari analisa data didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah dipahami dan diinterpretasikan.⁵⁶

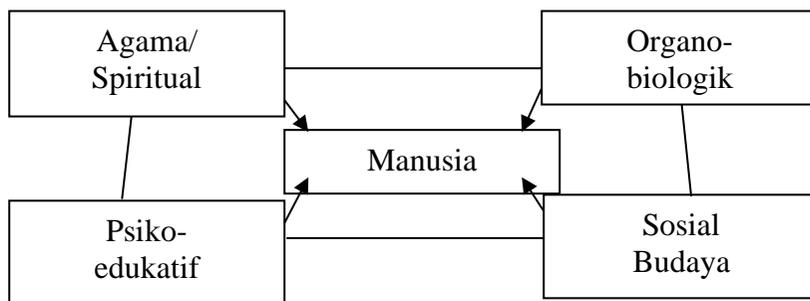
Pendekatan holistik yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan teori dari Dadang Hawari. Untuk mencapai perkembangan kepribadian yang baik tidak hanya oleh satu faktor

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Sidoarjo: Airlangga University Press, 2001), hal. 187.

saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pembentuk dari kepribadian manusia dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya; yaitu faktor organo-biologik, psikoedukatif, sosial budaya, dan Spiritual (Agama)”.⁵⁷

Pendekatan holistik menekankan bahwa masing-masing faktor ini saling berinteraksi, dan tentu saja yang sangat diharapkan adalah kondisi yang positif dari masing-masing faktor tersebut, agar pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi seimbang atau tidak pincang. Jika diperhatikan ke empat faktor tersebut menunjukkan bahwa keterpaduan dari masing-masing faktor itu akan menjadikan seorang anak manusia yang memiliki kepribadian yang kokoh jika masing-masing aspek/komponen itu berperan sebagaimana mestinya, oleh karenanya tidak bisa diabaikan salah satu dari faktor-faktor tersebut.

Jika digambarkan dalam sebuah diagram interaksi dari keempat faktor tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini:



Gambar 4.6 Diagram interaksi pendekatan holistik

⁵⁷ Dadang Hawari, *Psikopat, Paranoid, dan Gangguan Kepribadian Lainnya*, (Universitas Indonesia: Fakultas Kedokteran, 2005), hal. 21.

1) Faktor agama/spiritual

Salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah peran agama/spiritual. Agama/spiritual merupakan fitrah manusia, merupakan kebutuhan dasar manusia (*basic spiritual needs*), yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan hukum. Dengan kata lain, seseorang yang taat pada hukum, berarti ia bermoral dan beretika.

Seseorang yang bermoral dan beretika berarti ia beragama. Jika seseorang yang taat melakukan ajaran agamanya, tentulah ia akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dengan sendirinya ia akan merasakan kehidupan spiritualnya dengan damai dan tenang, karena kondisi spiritual seseorang memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material.⁵⁸

Dapat kita bayangkan jika manusia yang memiliki agama tidak pernah disentuh oleh hal-hal yang sifatnya spiritual dan keagamaan, maka sikap dan perilakunya akan jauh dari nilai-nilai moral dan etika. Seperti kondisi saat ini, betapa sangat memprihatinkannya moral manusia sekarang ini. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan hidupnya tidak dilandasi oleh ajaran agamanya. Manusia yang berperilaku seperti ini tidak hanya terjadi pada mereka yang tidak berpendidikan saja, bahkan yang berpendidikanpun

⁵⁸ Aliah B. Purwakanita Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 288.

berperilaku yang sama sehingga membuat banyak orang menjadi resah.

2) Faktor organo-biologik

Menurut Dadang Hawari⁵⁹ organo-biologik mengandung arti fisik (tubuh) termasuk susunan saraf pusat (otak), yang perkembangannya memerlukan makanan yang bergizi bebas dari penyakit, yang kejadiannya sejak dari pembuahan, bayi dalam kandungan, kemudian lahir sebagai bayi, dan seterusnya melalui tahapan anak (balita), remaja, dewasa dan usia lanjut. Bagi ibu hamil yang kurang memperhatikan masalah gizi berbagai hal bisa terjadi pada bayi, misalnya keguguran, cacat tubuh, bayi prematur, dsb.

Bagi anak yang dimasa dalam kandungannya memperoleh asupan gizi yang cukup akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi, begitu juga pada masa bayi, jika mendapatkan gizi yang cukup akan berpengaruh pada perkembangan masa anak-anak, dan begitu seterusnya. Untuk diketahui bahwa sampai pada usia 5 tahun pertama, adalah merupakan masa pertumbuhan yang pesat, karena sel otak tumbuh pesat pada masa lima tahun pertama tersebut. “Bayi yang mendapatkan asupan gizi yang seimbang baik kualitas maupun kualitasnya, meliputi: air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, akan memperoleh energy yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya.”⁶⁰

⁵⁹ Dadang Hawari, *Psikopat, Paranoid ...*, hal. 24.

⁶⁰ Danis Widyastuti dan Retno Widyani, *Panduan Perkembangan Anak 0-1 tahun*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional R.I., 2001), hal. 7.

Di samping makanan yang bergizi, kondisi si Ibu saat hamil berpengaruh pada tumbuh kembang manusia, bagi ibu yang mengidap penyakit tertentu secara langsung akan ditularkan kepada bayi yang ada dalam kandungannya. Oleh karena itu, bagi si ibu juga sangat penting untuk memelihara kesehatannya selama hamil, baik kondisi fisik maupun psikhisnya.

Kebutuhan akan gizi ini tentu saja tidak hanya diperhatikan pada saat anak dalam kandungan saja, melainkan selama rentang kehidupan manusia. Pada dasarnya apa saja yang dikonsumsi oleh manusia itu akan mempengaruhi kepada pertumbuhan dan perkembangannya.

3) Faktor psiko-edukatif

Pendidikan dalam keluarga banyak corak dan pola yang dilakukan oleh orang tua, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pola pendidikan, yaitu pendidikan otoriter, pendidikan demokratis, dan pendidikan liberal.⁶¹ Dalam pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulonprogo dengan melakukan pola pendidikan yang ada tersebut.

“Dalam pendidikan yang bercorak otoriter, anak-anak senantiasa harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh orang tuanya, sedang pada pendidikan yang bercorak liberal, anak-anak dibebaskan untuk menentukan tujuan dan cita-citanya. Makna pendidikan yang demokratis, menurut Ki

⁶¹ Sunarto dan Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 194.

Hajar Dewantara dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan hendaknya ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya: di depan memberi contoh, di tengah membimbing, dan dibelakang memberi semangat”.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian disertasi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri atas : latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian, kajian pustaka; kerangka teori; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang dipaparkan sub-sub bab secara garis besarnya antara lain perihal pendidikan Islam, pendidikan kerohanian Islam, kinerja kepolisian, metode pendidikan kerohanian Islam.

Bab III proses pembentukan pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulonprogo. Bab ini terdiri atas gambaran umum tentang Polres Kulonprogo dan pembinaan kerohanian Islam di Polres Kulonprogo.

Bab IV model pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulonprogo sebagai pengembangan kinerja anggota polri di Polres Kulonprogo. Bab ini terdiri atas hakekat pendidikan kerohanian Islam; faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan kerohanian Islam; faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota polri di Polres Kulonprogo, model pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulonprogo yang dapat meningkatkan kinerja anggota polri di Polres Kulonprogo.

Bab V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.